

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2020**





BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/241/KEP/24/2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
  12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



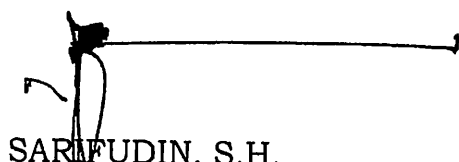
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
  2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020;
  3. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2020;
  4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020;
  5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020;
  6. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2020;
  7. Perubahan Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020;
  8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020;
  9. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020;
  10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020;
  11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020;
  12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020;
  13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020;
  14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020;
  15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2020
  16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020;
  17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020;
  18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020;
  19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020;
  20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020;
  21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2020;
  22. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020;
  23. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020;
  24. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2020;
  25. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Borobudur Tahun 2020;
  26. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2020;
  27. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam Tahun 2020;
  28. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung Tahun 2020;
  29. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukun Tahun 2020;
  30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawangan Tahun 2020;
  31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Tahun 2020;
  32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungkid Tahun 2020;



33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan Tahun 2020;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempuran Tahun 2020;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kajoran Tahun 2020;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2020;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bandongan Tahun 2020;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo Tahun 2020;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2020;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngablak Tahun 2020;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabag Tahun 2020;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2020;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Secang Tahun 2020;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun 2020;
45. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020;
46. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020;
47. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020; dan
48. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2020.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.  
Bendahara  
NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

---

### **I.1. Latar Belakang**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelaksanaan tugas fungsi dimaksud pada tahun 2019 mengacu pada rencana strategis (Renstra) DLH 2017-2019 dengan mempertimbangkan rancangan rencana strategis DLH 2019-2024.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Kabupaten Magelang, serta pagu indikatif dan perkiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang baru, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 telah dilaksanakan perubahan.

Bahwa dengan telah dilaksanakan analisa terhadap pelaksanaan perubahan renja DLH oleh Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, perlu diadakan perubahan renja DLH.

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020, perlu dibuat juga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah DLH tahun 2020.

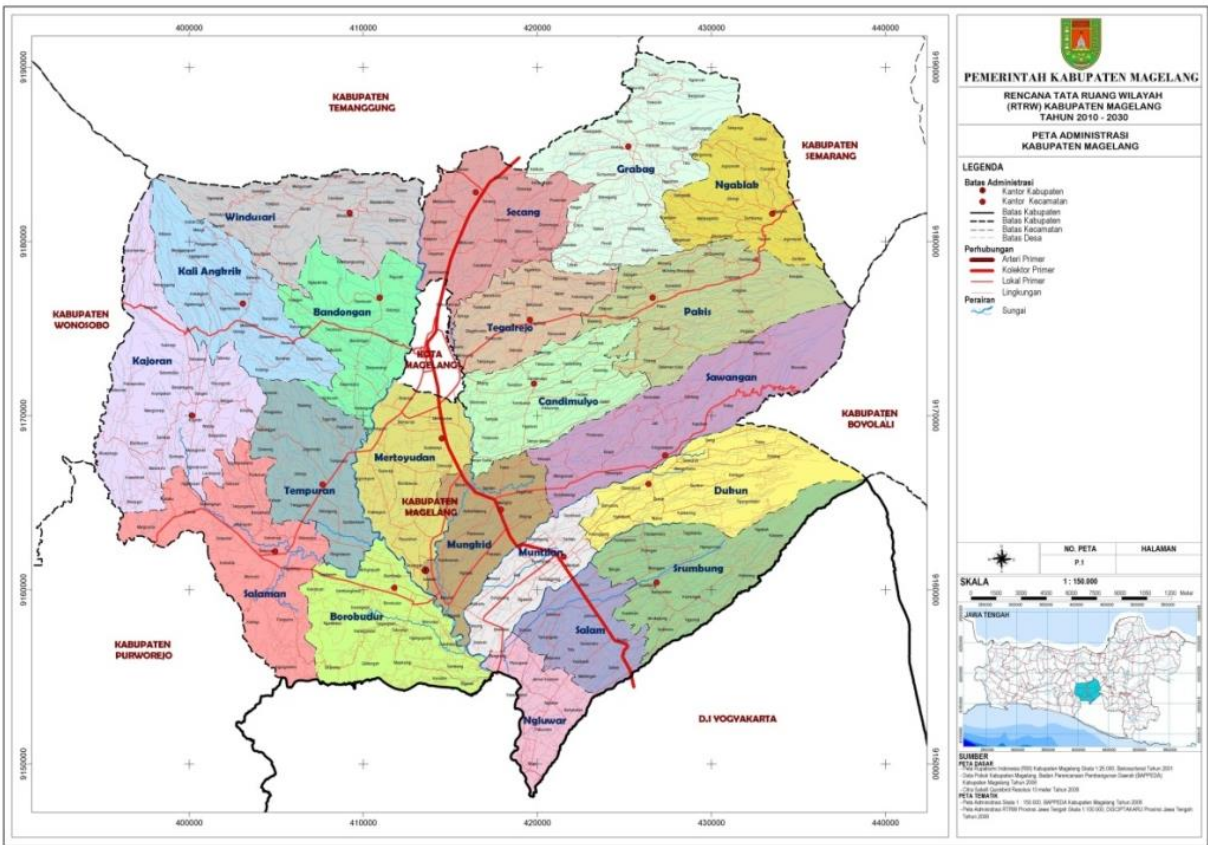
### **I.2. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **1.2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi**

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah menurut BPS seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih adalah 113.034,84 hektar. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut.



- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Bagian tengah : Kota Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang.

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 1.1

Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018

1.2.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara topografis sangat beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Daerah yang bertopografi datar seluas 8.599 ha, bergelombang seluas 44.784 ha, topografi curam seluas 41.037 ha, dan sangat curam seluas 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2  
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

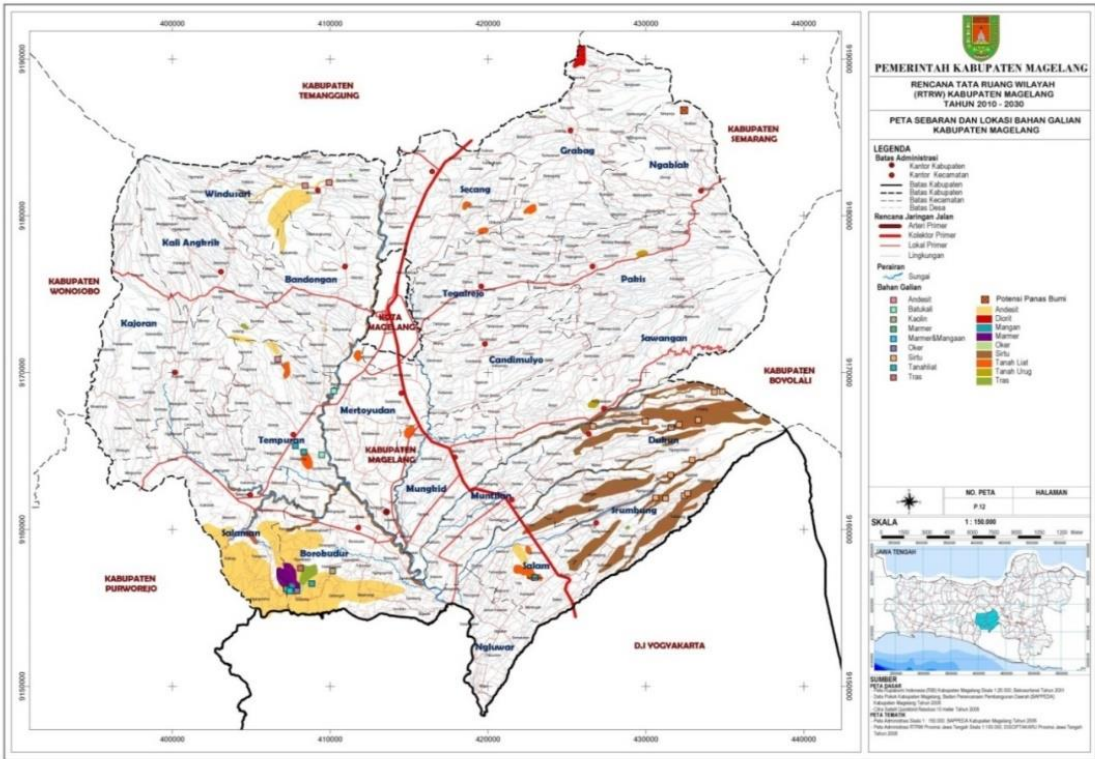
No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2%	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (± 1,5% dari luas wilayah)
2	2 – 15%	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah
3	15 – 40%	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah)
4.	> 40%	Berbukit sampai bergunung gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18% dari luas wilayah)

Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030



1.2.3 Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Kecamatan Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk Dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 1.2

Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang

Secara fisik, Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan (basin) dan dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Pegunungan Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang, seperti berlimpahnya bahan galian tambang golongan B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Jenis bahan tambang yang jumlahnya relatif banyak adalah pasir batu dan marmer.

1.2.4 Hidrologi

Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan



Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

- a. Air permukaan yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yang ada di Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo.
- b. Air tanah, di Kabupaten Magelang air tanah berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:
  - 1) Mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing.
  - 2) Mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada di antara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 m di atas permukaan laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas akuifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Penyusunan Profiling Mata Air tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terdapat 223 sumber mata air, yang mana 55 mata air merupakan sumber mata air baru yang berhasil diidentifikasi. Berdasarkan pengukuran dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Agustus 2018, dari 223 mata air, terdapat 13 mata air diidentifikasi mati dan 5 mata air tidak ada limpasan, sehingga mata air yang memiliki debit sebanyak 205 mata air dengan total debit dari hasil perhitungan sebesar 8.173,28 liter/detik. Debit tersebut jika dikonversi dalam setahun, maka memiliki potensi air mencapai 257.752.602 m<sup>3</sup>/tahun.

Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

#### 1.2.5 Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62°C dengan kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 189 hari dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018, curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 0 - 506 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.



Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson, Mohr maupun Oldeman, Kabupaten Magelang sebagian besar bertipe iklim basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm.

Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di daerah tertentu, sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Dengan jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup untuk membudidayakan padi sawah. Dan untuk budi daya palawija, jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan.

1.2.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Magelang terdiri atas lahan sawah, lahan kering dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2019 terdapat pengurangan luasan lahan sawah dari 36.681 hektar pada tahun 2018 menjadi 27.899 hektar, untuk lahan bukan pertanian terjadi penambahan luasan dari 22.398 hektar pada tahun 2018 menjadi 25.302 hektar pada tahun 2019.

Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.3  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 (Ha)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Lahan sawah					
1	Irigasi	27.898	27.653	27.732	27.732	22.911
2	Tadah hujan	8.964	9.202	8.949	8.949	4.988
	Jumlah	36.862	36.855	36.681	36.681	27.899
B	Lahan kering					
1	Tegal kebun	32.100	31.904	31.813	31.813	37.462
2	Perkebunan	399	2.219	2.317	2.317	2.725
3	Hutan rakyat	6.919	5.611	5.609	5.609	5.467
4	Padang rumput	2	2	2	2	2
5	Sementara tidak ditanami	107	7	7	7	9
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	10.016	9.807	9.746	9.746	3.207
7	Hutan Negara	-	-	-	-	6.500
	Jumlah	49.543	49.550	49.494	49.494	55.372
	Total lahan pertanian (A+B)	86.405	86.405	86.175	86.175	83.271
C	Lahan bukan pertanian					
1	(Jalan, permukiman, perkantorang, sungai, dll)	22.168	22.168	22.398	22.398	25.302
	TOTAL (A+B+C)	108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2016 – 2020

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.



Berdasarkan hasil penghitungan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan, namun ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Magelang. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak ada kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk. Kategori bersyarat/sedang terdapat di 12 kecamatan, yaitu di Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Tempuran. Sedangkan dan kategori baik terdapat di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandongan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Windusari.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lindung di Kabupaten Magelang, maka perlu dilihat daya dukung fungsi lindung.

Tabel 1.4  
Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2017

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	$\sum (ci \times Ai)$
Cagar Budaya	102,24	0,09%	0,18	18,40
Danau	1,56	0,00%	0,98	1,53
Hutan Lindung	1.363,57	1,21%	1	1.363,57
Hutan Produksi Terbatas	1.792,44	1,59%	0,68	1.218,86
Hutan Produksi Tetap	2.049,51	1,81%	0,68	1.393,67
Industri	152,52	0,13%	0,18	27,45
Kebun Campur	43.060,87	38,10%	0,54	23.252,87
Kolam	16,60	0,01%	0,98	16,27
Lahan Terbuka	221,57	0,20%	0,21	46,53
Permukiman	18.912,56	16,73%	0,18	3.404,26
Rumput	0,22	0,00%	0,28	0,06
Sawah	28.688,43	25,38%	0,46	13.196,68
Taman Nasional	4.406,78	3,90%	1	4.406,78
Tegalan	11.310,22	10,01%	0,21	2.375,15
Tubuh Air	955,75	0,85%	0,98	936,64
Total	113.034,84	100%	0,46	51.658,71

Sumber: KLHS RPJMD 2019-2024

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Magelang memiliki koefisien 0,46 berada dalam kategori sedang. Luas lahan kebun memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang



tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil.

Untuk hutan rakyat, luasannya selalu mengalami perubahan setiap tahunnya selama tahun 2014-2017. Secara implisit, penambahan luas hutan rakyat di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sumber daya hutan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi ekonomi dan juga mengurangi dampak bahaya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang seperti bencana gerakan tanah.

1.2.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Tabel 1.5  
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang  
Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	
1.a.	Hutan produksi terbatas	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak , dan Windusari
1.b.	Hutan produksi tetap	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salaman, Tempuran, dan Windusari
2	Kawasan hutan rakyat	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salam, Sawangan, Secang, Tempuran, dan Windusari
3	Kawasan peruntukan pertanian	
3.a.	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
3.b.	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
4	Kawasan peruntukan perkebunan	Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur, dan Salaman
5	Kawasan peruntukan perikanan	
5.a.	Daerah pembenihan	Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, dan Mungkid
5.b.	Daerah pembesaran perikanan	Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, dan Tegalrejo
6	Kawasan peruntukan peternakan	



No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
6.a.	Kawasan peternakan besar	Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, dan Kaliangkrik, Bandongan, Secang, Srumbung, dan Salam
6.b.	Kawasan peternakan sedang	Semua kecamatan
6.c.	Kawasan peternakan unggas	Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, dan Ngluwar
7	Kawasan peruntukan pertambangan	
7.a.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan pasir batu	Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Salam, Secang, Grabag, dan Salaman.
7.b.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan marmer	Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.
7.c.	Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam	Kecamatan Borobudur dan Salaman
8	Kawasan peruntukan pariwisata	
8.a.	Kawasan peruntukan pariwisata budaya	Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pasarean Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid, dan Candi Umbul
8.b.	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe, dan Telaga Bleder
8.c.	Kawasan peruntukan pariwisata buatan	Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening, dan Deyangan
9	Kawasan peruntukan industri	
9.a.	kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah	tersebar di masing-masing kecamatan
9.b.	Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	tersebar di masing-masing kecamatan



No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
9.c.	Kawasan peruntukan industri besar	Kecamatan Tempuran dan Salaman
10	Kawasan peruntukan permukiman	
10.a.	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	1. Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 2. Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 3. Ibukota-ibukota kecamatan yang meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan, dan Candimulyo
10.b.	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	tersebar di luar ibukota kecamatan
11	Kawasan peruntukan lainnya	
11.a.	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo, dan Tempuran
11.b.	Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	tersebar di masing-masing kecamatan

Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (*main-prime-mover*), yaitu sebagai berikut.

- a. Kawasan strategis cepat tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya.
- b. Kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan, meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, dan Kawasan Minapolitan.
- c. Kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya.



- d. Kawasan peruntukan industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Di samping pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, struktur ruang kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

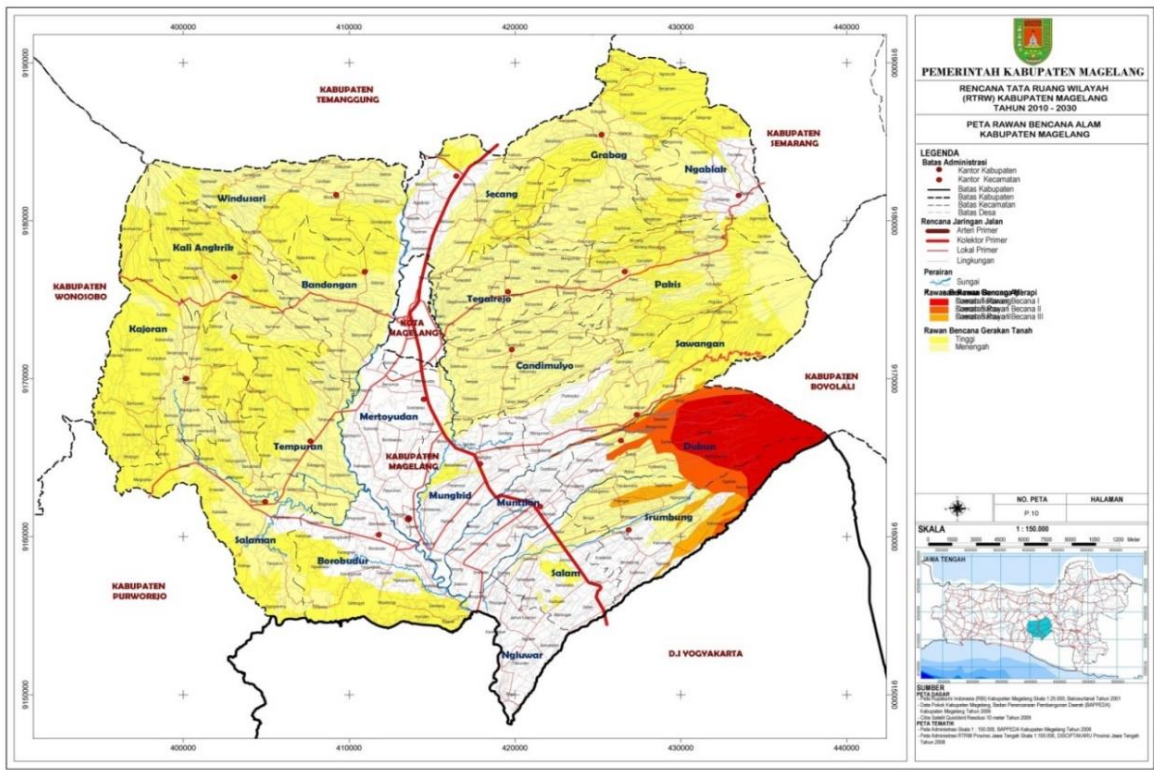
- a. pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
- b. pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak;
- c. pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan; dan
- d. Pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa.

### **1.2.8 Wilayah Rawan Bencana**

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang, antara lain:

- a. tanah longsor di 21 kecamatan;
- b. banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
- c. angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
- d. kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang), sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borobudur ( Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
- e. Kebakaran hutan;
- f. Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III
- g. Aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar Gunung Merapi, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan yang merupakan Kawasan rawan bencana II
- h. lahar/banjir dampak sekunder dari letusan Gunung Merapi meliputi : sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu yang merupakan Kawasan rawan bencana I
- i. Disamping itu, sebagian besar Wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki kemiringan lereng >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah.





Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030

Gambar 1.3

Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

I.3. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renja DLH Kabupaten Magelang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

#### **I.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja DLH adalah membuat penyesuaian arahan pelaksanaan program dan kegiatan DLH sesuai dengan evaluasi renja yang telah dilaksanakan. Adapun tujuannya adalah tersusunnya pedoman pelaksanaan kerja DLH yang terpadu dan sinergi antara keinginan masyarakat, target RKPD Kabupaten/Kota, Kondisi dan situasi Tahun 2020, Rencana Kerja pengelolaan lingkungan Hidup Provinsi Jawa tengah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Renja perubahan ini digunakan untuk acuan penyusunan KUA PPAS Perubahan.

#### **I.5. Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Renja SKPD DLH Kabupaten Magelang Tahun 2020 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang pengertian singkat Perubahan Renja SKPD DLH Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan urgensi terhadap penyusunannya yang terdiri dari:
  - a. Latar Belakang;
  - b. Gambaran Umum Pelayanan SKPD;
  - c. Landasan Hukum;
  - d. Maksud dan Tujuan; dan
  - e. Sistematika Penulisan.



2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH kabupaten Magelang hingga Triwulan II Tahun 2020, dan capaian prioritas dan target program Renstra DLH Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2020, serta isu strategis terkait kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam menyelesaikan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di kabupaten Magelang.
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Renja DLH Kabupaten Magelang
4. BAB IV PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Perubahan Renja DLH Kabupaten Magelang Tahun 2020.



BAB II  
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Triwulan II 2020 dan Capaian Renstra DLH.

Indikator kinerja pembangunan didasarkan pada inidikator program sesuai renstra DLH 2019-2024. Terdapat 2 (dua) indikator program penunjang dan 19 (sembilas belas) urusan lingkungan hidup. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan *lingkungan hidup* sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Urusan *Lingkungan Hidup*

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2020	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2020	Status Capaian Target	PD
				TW I 2020	TW II 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah							Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	88,25%	94,13%	Tercapai	
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	56,73%	78,37	Tercapai	
3	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca							
	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	64%	31%		na	na	Perlu upaya keras	
	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	72%	53%		na	na	Perlu upaya keras	
	Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	70%	28%		28%	28%	Tercapai	



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2020	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2020	Status Capaian Target	PD
				TW I 2020	TW II 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	27%	18%		18%	18%	Tercapai	
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup</b>							
	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	100%	72%		81%	81%	Tercapai	
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100%	100%		0%	0%	Perlu upaya keras	
	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	100%	100%		100%	100%	Tercapai	
	Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH	48%	29%		0%	0%	Perlu upaya keras	
5	<b>Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>							
	Persentase jumlah sampah yang tertangani*	30,43%	16,38%		17,97%	17,97%	Tercapai	
	Persentase cakupan area pelayanan sampah	13,44%	7,8%		7,8%	7,8%	Tercapai	
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R*	24,48%	19,11%		18,91%	18,91%	Tercapai	
6	<b>Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>							
	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	1,88%	1,88%		1,88%	1,88%	Tercapai	
	Persentase RTH Publik yang dikelola	25,86%	25,86%		25,16%	25,16%	Tercapai	
	Persentase Ketersediaan RTH	37,71%	37,71%		37,71%	37,71%	Tercapai	



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2020	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2020	Status Capaian Target	PD
				TW I 2020	TW II 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Privat di Wilayah Perkotaan							
7	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim</b>							
	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	3,68%	2,41%		2,56%	2,56%	Tercapai	
	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	0,88%	0,72%	0,59%	0,78%	0,78%	Tercapai	
	Persentase mata air yang dikonservasi	32%	12%	16,14%	16%	16%	Tercapai	
	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	9,95%	3,76%	0%	3,76%	3,76%	Tercapai	
	Persentase sekolah Adiwiyata	18,11%	18,33%	0%	19,55%	19,55	Tercapai	

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dari 21 indikator urusan lingkungan hidup diketahui bahwa 17 target indikator berstatus telah tercapai, dan 4 indikator perlu Upaya Keras atau perlu perhatian.
- b) Empat (4) indikator yang perlu perhatian tersebut disebabkan pengaruh Pandemi Covid 19 yang menyebabkan pengurangan anggaran kegiatan



Tabel 2.2  
Capaian Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) sampai dengan Tri Wulan II 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TIPE PERHITUNGAN	TARGET		TRIWULAN I			TRIWULAN II		
			RENSTRA	PK	Realisasi	(%)	Analisis	Realisasi	(%)	Analisis
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Persentase pengelolaan sampah	Kondisi Akhir	41%	41 %	37,17%	90,66 %	<b>Analisis:</b> Sampai dengan bulan maret telah terkelola sampah sebesar 242,86 Ton/Hari sampah dari Target sebesar 653 Ton/Hari timbunan sampah. <b>Hambatan/permasalahan:</b> - sampah yang terhitung hanya di penimbangan TPA Pasuruhan. - Belum ada kontrol jumlah sampah di tangani di TPSS - Keterbatasan TPA - Jumlah pengurangan sampah belum update <b>Rencana Tindak Lanjut/Aksi:</b> - Percepatan Revitalisasi TPSS - Optimalisasi cakupan layanan.	36,47%	88,95 %	<b>Analisis:</b> Sampai dengan bulan Juni telah terkelola sampah sebesar 238,31 Ton/Hari sampah dari Target sebesar 653 Ton/Hari timbunan sampah. <b>Hambatan/permasalahan:</b> - sampah yang terhitung hanya di penimbangan TPA Pasuruhan. - Belum ada kontrol jumlah sampah di tangani di TPSS - Keterbatasan TPA - Jumlah pengurangan sampah belum update <b>Rencana Tindak Lanjut/Aksi:</b> - Percepatan Revitalisasi TPSS - Optimalisasi cakupan layanan.
	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	Kondisi Akhir	39,59%	39,59 %	39,59%	100,00%	<b>Analisis :</b> Luas wilayah RTH sebesar 6.361,65 Ha dari luas wilayah administrasi desa perkotaan seluas 16.069,09 Ha. <b>Hambatan/permasalahan:</b> - Belum ada kejelasan luas wilayah kota fungsional <b>Rencana Tindak Lanjut/Aksi:</b> - Peningkatan kinerja pengelolaan RTH.	39,59%	100%	<b>Analisis :</b> Luas wilayah RTH sebesar 6.361,65 Ha dari luas wilayah administrasi desa perkotaan seluas 16.069,09 Ha. <b>Hambatan/permasalahan:</b> - Belum ada kejelasan luas wilayah kota fungsional <b>Rencana Tindak Lanjut/Aksi:</b> - Peningkatan kinerja pengelolaan RTH.



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TIPE PERHITUNGAN	TARGET		TRIWULAN I			TRIWULAN II		
			RENSTRA	PK	Realisasi	(%)	Analisis	Realisasi	(%)	Analisis
	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Kondisi akhir	7,53%	7,53%	8,59%	114,08%	<b>Analisis :</b> Sampai dengan bulan maret terdapat 437,89 Ha konservasi kawasan resapan air, 36 mata air dikonservasi, 527,49 kawasan rawan bencana yang dikooservasi, 43 sekolah adiwiyata dan 21 Desa Proklim. <b>Hambatan/permasalahan :</b> - <b>Rencana Tindak Lanjut/Aksi :</b> -	8,59%	114,08%	<b>Analisis :</b> Sampai dengan bulan Juni terdapat 437,89 Ha konservasi kawasan resapan air, 36 mata air dikonservasi, 527,49 kawasan rawan bencana yang dikooservasi, 43 sekolah adiwiyata dan 21 Desa Proklim. <b>Hambatan/permasalahan :</b> - <b>Rencana Tindak Lanjut/Aksi :</b> -
	Presentase usaha dan atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	Kondisi akhir	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	<b>Analisis :</b> Sampai dengan bulan maret belum dilaksanakan verifikasi PROPER <b>Hambatan/permasalahan :</b> - <b>Rencana Tindak Lanjut/Aksi :</b> -	0,00%	0,00%	<b>Analisis :</b> Sampai dengan bulan Juni masih dilaksanakan verifikasi PROPER. <b>Hambatan/permasalahan :</b> - <b>Rencana Tindak Lanjut/Aksi :</b> -

Tabel 2.3  
Capaian Kinerja Kegiatan sampai dengan Tri Wulan II 2020.

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Persentase pengelolaan sampah	54,91	%	35,49	%	41,2	%	37,17	%	90,22%	78,37	%	
	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru*	22	%	8	%	10	%	0	%	0,00%	10	%	
	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59	%	39,59	%	39,59	%	39,59	%	100,00%	79,18	%	



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	<b>Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim</b>	<b>12,98</b>	%	<b>7,47</b>	%	<b>7,53</b>	%	<b>8,18</b>	%	<b>108,58</b> %	<b>15,12</b> <b>98</b>	%	
<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%		%	<b>88,25%</b>	88,25 %	%	<b>82,66%</b>
Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah surat yang dikelola	34000	Surat	3819	Surat	6000	Surat	3666	Surat	61,10%	7485	Surat	22,01%
	2. Jumlah arsip yang dikelola	4	Jenis Arsip	4	Jenis Arsip	4	Jenis Arsip	4	Jenis Arsip	100,00%	4	Jenis Arsip	100,00%
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	575	Orang Hari	150	Orang Hari	17	Orang Hari	21	Orang Hari	123,53%	171	Orang Hari	29,74%
	2. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	95	Rapat	30	Rapat	10	Rapat	8	Rapat	80,00%	38	Rapat	40,00%
	3. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	780	Orang Hari	650	Orang Hari	8	Orang Hari	11	Orang Hari	137,50%	661	Orang Hari	84,74%
	4. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	30	Kali	6	Kali	2	Kali	1	Kali	50,00%	7	Kali	23,33%
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	6	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket		1	Paket	16,67%
	2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	6	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket		1	Paket	16,67%
	3. Jumlah aset yang dikelola	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket		1	Paket	100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	2400	m <sup>2</sup>	21945	m <sup>2</sup>	21945	m <sup>2</sup>	21945	m <sup>2</sup>	100,00%	2194 5	m <sup>2</sup>	914,38%
	2. Jumlah rekening air, listrik, telepon dan surat kabar yang dibayar	240	rekening bulan	120	rekening bulan	120	rekening bulan	48	rekening bulan	40,00%	48	rekening bulan	20,00%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	45	Unit	40	Unit	14	Unit	11	Unit	78,57%	11	Unit	24,44%
	2. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	30	Unit	20	Unit	0	Unit	0	Unit		0	Unit	0,00%
	3. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	8	Unit	8	Unit	8	Unit	8	Unit	100,00%	8	Unit	100,00%
	4. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	14	Unit	11	Unit	11	Unit	11	Unit	100,00%	11	Unit	78,57%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Frekuensi pembinaan ASN	20	Kali	0	Kali	0	Kali	0	Kali		0	Kali	0,00%
	2. Jumlah ASN yang dibina	110	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang		0	Orang	0,00%
	4. Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	6	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang		0	Orang	0,00%
<b>Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>%</b>	<b>56,73%</b>		<b>%</b>	<b>26,36%</b>
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1. Jumlah laporan keuangan yang tersusun	30	Dokumen	5	Dokumen	13	Dokumen	7	Dokumen	53,85%	12	Dokumen	40,00%
	2. Jumlah Kegiatan Yang dikelola	42	Kegiatan	52	Kegiatan	42	Kegiatan	42	Kegiatan	100,00%	42	Kegiatan	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	1	Dokumen	16,67%
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	24	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00%	8	Dokumen	33,33%
	2. Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	50,00%	18	Dokumen	25,00%
	3. Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	50,00%	18	Dokumen	25,00%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	5. Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0,00%
Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	1. Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0,00%
	2. Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0,00%
	3. Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	33,33%
	4. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	1	Dokumen	16,67%
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca								%		85,61%	31	%	18,15%
	1. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	64	%	22	%	31	%	na					0,00%
	2. Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	72	%	65	%	53	%	na	%	#VALUE!	#VALUE!	%	#VALUE!
	3. Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	70	%	28	%	28	%	na	%	#VALUE!	#VALUE!	%	#VALUE!
	4. Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	27	%	18	%	18	%	18	%	100,00 %	36	%	133,33%
Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.	1. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU	50	Usaha/Ke giatan	4	Usaha/K egiatan	0	Usaha/Ke giatan	0	Usaha/K egiatan		4	Usaha/K egiatan	8,00%
	2. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	200	usaha/ke giatan	40	usaha/ke giatan	30	usaha/ke giatan	30	usaha/ke giatan	100,00%	70	usaha/ke giatan	35,00%
	3. Jumlah peserta sosialisasi	500	orang	54	orang	30	orang	30	orang	100,00%	84	orang	16,80%
	4. Jumlah dokumen pengendalian kualitas udara yang dibuat	10	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0,00%	2	dokumen	20,00%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	5. Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	50	lokasi	0	lokasi	0	lokasi	0	lokasi		0	lokasi	0,00%
	6. Jumlah usaha/kegiatan yang dibina	150	usaha/kegiatan	0	usaha/kegiatan	0	usaha/kegiatan	0	usaha/kegiatan		0	usaha/kegiatan	0,00%
	8. Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*	5	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		1	Dokumen	20,00%
Pengendalian Pencemaran Limbah B3	1. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	300	usaha/kegiatan	50	usaha/kegiatan	40	usaha/kegiatan	40	usaha/kegiatan	100,00%	90	usaha/kegiatan	30,00%
	2. Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan	30	Rekomen dasi/ijin	5	Rekomen dasi/ijin	1	Rekomen dasi/ijin	1	Rekomen dasi/ijin	100,00%	6	Rekomen dasi/ijin	20,00%
	3. Jumlah dokumen yang dibuat	5	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen		0	dokumen	0,00%
Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	1. Jumlah dokumen yang dibuat	10	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	0	dokumen		2	dokumen	20,00%
	2. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau	110	usaha/kegiatan	10	usaha/kegiatan	4	usaha/kegiatan	4	usaha/kegiatan	100,00%	14	usaha/kegiatan	12,73%
	3. Jumlah sungai yang diuji	88	Sungai	13	Sungai	0	Sungai	0	Sungai		13	Sungai	14,77%
	4. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	180	usaha/kegiatan	30	usaha/kegiatan	30	usaha/kegiatan	60	usaha/kegiatan	200,00%	90	usaha/kegiatan	50,00%
	5. Jumlah rekomendasi/ijin IPLC yang dikeluarkan	30	rekomendasi/ijin	5	rekomen dasi/ijin	1	rekomendasi/ijin	1	rekomen dasi/ijin	100,00%	6	rekomen dasi/ijin	20,00%
	6. Jumlah embung/waduk yang diuji	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.	1. Jumlah peserta sosialisasi	750	orang	0	orang	100	orang	100	orang	100,00%	100	orang	13,33%
	2. Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk	16	kelompok	0	kelompok	0	kelompok	0	kelompok		0	kelompok	0,00%
	3. Jumlah titik lokasi bersih kali	25	Sungai	0	Sungai	0	Sungai	0	Sungai		0	Sungai	0,00%
	4. Jumlah sarpras pemeliharaan sungai	5	paket	0	paket	0	paket	0	paket		0	paket	0,00%
	5. Jumlah sarpras PPA yang diadakan	4	paket	0	paket	0	paket	0	paket		0	paket	0,00%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.	1. Jumlah Sampel yang diperiksa	1650	Sampel	150	Sampel	100	Sampel	50	Sampel	50,00%	200	Sampel	12,12%
	2. Jumlah Peralatan Laboratorium yang dibeli	6	Paket	1	Paket	1	Paket	0	Paket		1	Paket	16,67%
	3. Jumlah Bahan Kimia/ Reagen yang dibeli	6	Paket	1	Paket	1	Paket	0	Paket		1	Paket	16,67%
	4. Jumlah Limbah yang dikelola	5290	Kg	640	Kg	600	Kg	400	Kg	66,67%	1040	Kg	19,66%
	5. Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara	6	Paket	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00%	1	Paket	16,67%
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.	1. Jumlah Personel yang mengikuti Bimtek	15	Pelatihan	3	Pelatihan	0	Pelatihan	0	Pelatihan		3	Pelatihan	20,00%
	2. Jumlah Sistem yang dikelola	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	100,00%
	3. Jumlah Parameter yang Terakreditasi	25	Parameter	11	Paramete r	11	Parameter	9	Paramete r	81,82%	11	Paramete r	44,00%
<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup</b>								0	%	<b>57,14%</b>		%	<b>23,25%</b>
	<b>1. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan</b>	<b>100</b>	%	<b>72</b>	%	<b>60</b>	%	<b>81</b>					0,00%
	<b>2. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>0</b>	%	<b>0</b>	%		<b>0</b>	%	0,00%
	<b>3. Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%		<b>200</b>	%	200,00%
	<b>4. Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH</b>	<b>48</b>	%	<b>29</b>	%	<b>0</b>	%	<b>0</b>	%		<b>0</b>	%	0,00%
Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi	2197	Usaha dan/atau Kegiatan	1813	Usaha dan/atau Kegiatan	244	Usaha dan/atau Kegiatan	244	Usaha dan/atau Kegiatan	100,00%	2057	Usaha dan/atau Kegiatan	93,63%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi	14	Usaha dan/atau Kegiatan	4	Usaha dan/atau Kegiatan	2	Usaha dan/atau Kegiatan	2	Usaha dan/atau Kegiatan	100,00%	6	Usaha dan/atau Kegiatan	42,86%
	3. Jumlah peserta sosialisasi	1080	peserta	80	peserta	0	peserta	0	peserta		80	peserta	7,41%
	4. Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup	315	Peserta	65	Peserta	50	Peserta	0	Peserta	0,00%	65	Peserta	20,63%
	5. Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan	7	paket	2	paket	0	paket	0	paket		2	paket	28,57%
	6. Jumlah usaha dan/atau kegiatan non tambang yang diawasi	185	Usaha/Ke giatan	135	Usaha/K egiatan	10	Usaha/Ke giatan	10	Usaha/K egiatan	100,00%	145	Usaha/K egiatan	78,38%
	8. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan DLH	5	paket	0	paket	0	paket	0	paket		0	paket	0,00%
Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.	1. Jumlah dokumen IKLH	2	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	0	dokumen		2	dokumen	100,00%
	2. Jumlah dokumen IKPLHD	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen		1	dokumen	100,00%
	3. Jumlah dokumen laporan evaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0,00%	0	dokumen	0,00%
	4. Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	5. Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup	100	peserta	0	peserta	0	peserta	0	peserta		0	peserta	0,00%
	6. Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	5	paket	0	paket	0	paket	0	paket		0	paket	0,00%
	7. Penyusunan RPPLH	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0	Dokumen	0,00%
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.	1. Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	36	pengharg aan	6	pengharg aan	0	pengharg aan	0	pengharg aan		6	pengharg aan	16,67%
	2. Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup	6	rancanga n	0	rancanga n	0	rancanga n	0	rancanga n		0	rancanga n	0,00%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	3. Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup	100	orang	0	orang	0	orang	0	orang		0	orang	0,00%
	4. Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	150	orang	0	orang	0	orang	0	orang		0	orang	0,00%
	5. Jumlah peserta sosialisasi adipura	600	orang	30	orang	0	orang	0	orang		30	orang	5,00%
	6. Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura	48	kali	0	kali	0	kali	0	kali		0	kali	0,00%
	7. Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat	133	peserta	10	peserta	0	peserta	0	peserta		10	peserta	7,52%
Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup.	1. Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	150	kasus	50	kasus	6	kasus	6	kasus	100,00%	56	kasus	37,33%
	2. Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan yang di evaluasi	80	laporan	30	laporan	0	laporan	0	laporan		30	laporan	37,50%
	3. Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan	55	surat	5	surat	0	surat	0	surat		5	surat	9,09%
	4. Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan	375	orang	75	orang	0	orang	0	orang		75	orang	20,00%
	5. Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan	25	titik	0	titik	0	titik	0	titik		0	titik	0,00%
<b>Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>								%		<b>91,67%</b>			<b>24,16%</b>
	<b>1. Persentase jumlah sampah yang tertangani*</b>	<b>30,43</b>	%	<b>16,38</b>	%	<b>20</b>	%	<b>17,97</b>			20	%	65,72%
	<b>2. Persentase cakupan area pelayanan sampah</b>	<b>13,44</b>	%	<b>7,8</b>	%	<b>10</b>	%	<b>7,8</b>	%	<b>78,00%</b>	<b>17,8</b>	%	132,44%
	<b>3. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R*</b>	<b>24,48</b>	%	<b>19,11</b>	%	<b>23</b>	%	<b>18,51</b>	%	<b>80,48%</b>	<b>41,51</b>	%	169,57%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	2. Jumlah TPST yang dibangun	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	3. Jumlah TPSS yang direvitalisasi/dibangun	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	8. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kelayakan yang disusun	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0,00%
	9. Jumlah Alat Pengolah Sampah Yang dibeli	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	11. Jumlah Lahan TPSS yang dibeli	20	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	13. Lahan TPS3R yang dibeli	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	14. Jumlah Alat GPS Kendaraan dan Kelengkapan instalasinya yang dibeli	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah.	1. Jumlah Alat yang dipelihara	110	Unit	97	Unit	97	Unit	97	Unit	100,00%	97	Unit	88,18%
	2. Jumlah kendaraan yang dikelola	42	Unit	37	Unit	38	Unit	38	Unit	100,00%	38	Unit	90,48%
	3. Jumlah Pengelola Penanganan Sampah yang dikelola	280	Orang	215	Orang	215	Orang	215	Orang	100,00%	215	Orang	76,79%
	4. Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras	6	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket		1	Paket	16,67%
	5. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	6	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket		1	Paket	16,67%
	7. Jumlah Laporan Penanganan Sampah	6	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		1	Dokumen	16,67%
Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.	1. Jumlah Alat yang dipelihara	4	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100,00%	3	Unit	75,00%
	2. Jumlah kendaraan yang dikelola	35	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100,00%	4	Unit	11,43%
	3. Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola	5	Orang	10	Orang	10	Orang	10	Orang	100,00%	10	Orang	200,00%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	4. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	5. Jumlah Bahan Pengolah Sampah yang dibeli	5	Paket	0	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00%	0	Paket	0,00%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.	1. Jumlah sosialisasi	105	Kali	5	Kali	8	Kali	8	Kali	100,00%	13	Kali	12,38%
	2. Jumlah Bank sampah Yang dibina	500	Unit		Unit	10	Unit	10	Unit	100,00%	10	Unit	2,00%
	3. Jumlah Lomba Bank Sampah yang dilaksanakan	6	Paket		Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	16,67%
	5. Jumlah bantuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah	6	Paket		Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	7. Fasilitasi Gerakan Pungut Sampah	30	Kali		Kali	1	Kali	1	Kali	100,00%	1	Kali	3,33%
	8. Pembentukan Bank Sampah Kantor dan Sekolah	50	Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	100,00%	1	Unit	2,00%
	9. Jumlah Laporan Pengurangan Sampah	6	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0,00%
	11. Jumlah publikasi pengurangan sampah yang dibuat	5	Paket		Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
<b>Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>										<b>100,00 %</b>	1,88	%	<b>85,37%</b>
	<b>1. Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan</b>	<b>1,88</b>	%	<b>1,88</b>	%	<b>1,88</b>	%	<b>1,88</b>	%				0,00%
	<b>2. Persentase RTH Publik yang terkelola</b>	<b>25,86</b>	%	<b>25,86</b>	%	<b>25,86</b>	%	<b>na</b>	%	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	%	<b>#VALUE!</b>
	<b>3. Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan</b>	<b>37,71</b>	%	<b>37,71</b>	%	<b>37,71</b>	%	<b>37,71</b>	%	<b>100,00 %</b>	<b>75,42</b>	%	200,00%
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	1. Jumlah kendaraan yang dikelola	16	Unit		Unit	14	Unit	14	Unit	100,00%	14	Unit	87,50%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	2. Jumlah alat yang dikelola	70	Unit		Unit	53	Unit	53	Unit	100,00%	53	Unit	75,71%
	3. Jumlah kendaraan yang dibeli	5	Unit		Unit	0	Unit	0	Unit		0	Unit	0,00%
	5. Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola	20	Orang		Orang	53	Orang	53	Orang	100,00%	53	Orang	265,00%
	6. Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH	6	Paket		Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	16,67%
	8. Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli	6	Paket		Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	9. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	245	Unit		Unit	2169	Unit meter	2169	Unit	100,00%	2169	Unit	885,31%
	10. Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli	11	Paket		Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	9,09%
	11. Penyusunan DED	5	Paket		Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	20,00%
	identifikasi sempadan (kepemilikan,kewenangan)	1	Paket		Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	13. Pembangunan RTH	30	Paket		Paket	2	Paket	2	Paket	100,00%	2	Paket	6,67%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	2. Pendataan dan identifikasi sekolah	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	3. Penyusunan DED RTH sekolah sekolah	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	4. Pembangunan RTH sekolah	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	5. Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesan	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	6. Sosialisasi RTH	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim</b>					%				%	<b>106,32 %</b>		%	<b>20,48%</b>
	<b>1. Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi</b>	<b>3,68</b>	%	<b>2,41</b>	%	<b>2,41</b>	%	<b>2,53</b>	%		<b>4,938 11</b>	%	134,19%
	<b>2. Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi</b>	<b>0,88</b>	%	<b>0,72</b>	%	<b>0,59</b>	%	<b>0,78</b>	%	<b>132,26 %</b>	<b>1,500 32</b>	%	170,49%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020		Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020		Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	<b>3. Persentase mata air yang dikonservasi</b>	<b>32</b>	%	<b>12</b>	%	<b>14</b>	%	<b>16,14</b>	%	<b>115,31</b> %	<b>28,14</b> <b>35</b>	%	87,95%
	<b>4. Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim</b>	<b>9,95</b>	%	<b>3,76</b>	%	<b>4,57</b>	%	<b>1,882</b>	%	<b>41,18%</b>	<b>5,641</b> <b>72</b>	%	56,70%
	<b>5. Persentase sekolah Adiwiyata</b>	<b>18,11</b>	%	<b>18,33</b>	%	<b>15,88</b>	%	<b>19,55</b>	%	<b>123,08</b> %	<b>35,42</b> <b>55</b>	%	195,61%
Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	1. Jumlah Sekolah Adiwiyata yang di bina	292	sekolah	120	sekolah	100	sekolah	100	sekolah	100,00%	220	sekolah	75,34%
	3. Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata	1	paket	0	paket	0	paket	0	paket		0	paket	0,00%
	4. Jumlah Peserta sosialisasi Sekolah Adiwiyata	1900	orang	100	orang	0	orang	0	orang		100	orang	5,26%
	5. Jumlah peserta Bimtek Sekolah Adiwiyata	1200	orang	200	orang	200	orang	200	orang	100,00%	400	orang	33,33%
	6. Jumlah penerima penghargaan Kalpataru	6	orang/ke ompok	1	orang/ke lompok	0	orang/ke ompok	0	orang/ke ompok		1	orang/ke lompok	16,67%
	7. Jumlah Pramuka saka kalpataru yang dibina	3	kelompok	1	kelompok	0	kelompok	0	kelompok		1	kelompok	33,33%
	8. Jumlah Desa Proklam yang dibina	95	Desa	14	Desa	35	Desa	35	Desa	100,00%	49	Desa	51,58%
	9. Jumlah fasilitasi sapras Desa proklam	5	paket	0	paket	0	paket	0	paket		0	paket	0,00%
	10. Jumlah peserta Bimtek Proklam	1800	orang	50	orang	50	orang	50	orang	100,00%	100	orang	5,56%
	11. Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan	6	Kali	1	Kali	0	Kali	0	Kali		1	Kali	16,67%
Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.	1. Review dokumen kajian status kerusakan lahan	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen		0	Dokumen	0,00%
	2. Penghijauan untuk konservasi rawan bencana	300	Ha	50	Ha	0	Ha	0	Ha		50	Ha	16,67%
	4. Jumlah peserta sosialisasi	3600	orang	400	orang	0	orang	0	orang		400	orang	11,11%
	5. Jumlah Peserta Bimtek	1000	orang	0	orang	0	orang	0	orang		0	orang	0,00%
	6. Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman	1900	orang	400	orang	500	orang	500	orang	100,00%	900	orang	47,37%



<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)</b>	<b>Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)</b>		<b>Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2019</b>		<b>Target Kinerja 2020</b>		<b>Realisasi Kinerja TW II Tahun 2020</b>		<b>Tingkat Kinerja TW II Tahun 2020 (%)</b>	<b>Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tri Wulan II Tahun 2020</b>		<b>Tingkat Kinerja Renstra s/d Tahun 2020 (%)</b>
Konservasi Kawasan Resapan Air..	1. Jumlah alat biopori yang dibeli	6	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100,00%	2	paket	33,33%
	2. Jumlah sumur resapan yang dibuat	12	paket	2	paket	0	paket	0	paket		2	paket	16,67%
	3. Jumlah dokumen kajian yang dibuat	5	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0,00%	0	dokumen	0,00%
	4. luas lahan yang dikonservasi	300	Ha	27	Ha	20	Ha	20,6	Ha	103,00%	47,6	Ha	15,87%
	5. jumlah orang yang disosialisai	1000	orang	0	orang	200	orang	200	orang	100,00%	200	orang	20,00%
	6. Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	60	kelompok	10	kelompok	15	kelompok	15	kelompok	100,00%	25	kelompok	41,67%
	8. Pembuatan senderan pengaman mata air	6	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket		1	Paket	16,67%
	9. Jumlah pohon aren yang diselamatkan	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket		0	Paket	0,00%
	10. Jumlah pohon yang ditanam dari Bank Pohon	5000	Pohon	0	Pohon	1000	Pohon	1701	Pohon	170,10%	1701	Pohon	34,02%
Konervasi Keanekaragaman Hayati.	1. jumlah dokumen yang dibuat	10	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen		0	dokumen	0,00%
	2. Jumlah tanaman langka yang ditanam	5	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	20,00%
Koservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana (DBHCHT)	Penghijauan untuk Konservasi rawan bencana	150	Ha	0	Ha	30	Ha	62,7	Ha	209,00%	62,7	Ha	41,80%



## **2.2. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada Bulan Maret Tahun 2020, Indonesia mengalami keadaan darurat pandemi COVID 19. Dalam rangka antisipasi dampak kesehatan, lingkungan, sosial dan ekonomi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang melaksanakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi tersebut.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM khususnya dibidang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam bidang lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga di masa yang akan datang sistem data dan informasi lingkungan hidup menjadi salah satu sumber informasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial maupun lainnya.

## **2.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Terkait dengan masukan dari berbagai elemen tentang kegiatan yang diusulkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menambahkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, maupun dari yang langsung ditujukan kepada dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang berdasarkan hasil pengumpulan informasi serta penelitian dilapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta masyarakat dan stakeholder lainnya belum sepenuhnya menyadari bahwa pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan dan pencegahan kerusakan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG**

---

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pokok-pokok Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang meliputi arah dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan pokok-pokok kebijakan pemerintah melalui program 100-0-100 dan milenium development goals yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
  - a. Perlu peningkatan kualitas informasi tentang konsep dan rujukan Pembangunan yang berkelanjutan.
  - b. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, disamping koordinasi antar institusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan tentang pembangunan yang berkelanjutan.
2. Arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan
  - a. Peningkatan pemahaman tentang konsep berwawasan lingkungan
  - b. Perlunya sosialisasi kepada pelaku usaha tambang dan industri tentang pentingnya industri yang berwawasan lingkungan.

Adapun kebijakan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan penataan dan penataan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Peningkatan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Peningkatan sarana/prasarana dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Peningkatan kerjasama antar lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah domestik;
5. Mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan serta pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah dan antar sektor;
8. Meningkatkan kualitas data dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.



Tabel 3. 1.  
Rekapitulasi jumlah Program dan Kegiatan pada Renstra DLH 2019-2024

No	URUSAN/BIDANG	JML PROGRAM	JML KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT		JML PAGU	JMK PROGRAM PENDUKU NG PD/PN	
				OUTCOME	OUTPUT		PD	PN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.0	Pada Semua SKPD							
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	5	21	19	141		5	3
2,1	Lingkungan Hidup	5	21	19	141		5	3
3	Urusan Pilihan	0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0		0	0
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1	2	1	2		0	0
4,1	Administrasi Pemerintahan	1	6	1	6			
4.5	Kepegawaian				4			
4,3	Perencanaan	1	2	1	5			
4,2	Pengawasan		1		4			
4,4	Keuangan		1		2			
	Jumlah	11	68	16	89		5	3

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH) mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan



memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Berdaya Saing. Misi – misi Bupati saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Kabupaten Magelang harus memiliki keunggulan berbasis karakteristiknya sebagai daerah konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola seoptimal mungkin sebagai titipan anak cucu dan generasi penerus. Semua stakeholder pembangunan berkelanjutan secara bijak dan kreatif mensinergikan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat ekonomi.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Tujuan dan sasaran daerah mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi DLH diuraikan melalui misi kedua. Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Capaian Pembangunan Wilayah Berkelanjutan (CPWB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), *gini ratio*, dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:

- a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH;
- b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator indeks pembangunan wilayah;
- c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah **“tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH”**. Oleh karena itu, Renstra mengadopsi



sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas lingkungan Hidup periode renstra 2019 - 2024 adalah **“Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan”**, Dengan indikator:

1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim
2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan
3. Persentase pengelolaan sampah
4. Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru

Rumusan lengkap dan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2.



Tabel 3. 2.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah”

Misi	Tujuan	Sasaran Daerah / Tujuan DLH	Sasaran DLH	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah			Capaian Pemba ngunan Wilayah Berkelan jutan	%	69,76	63,40	67,13	71,13	75,10	78,85	82,67	82,67
		Tercapai nya kualitas lingkung an hidup yang baik		IKLH		71,93	72,10	72,12	72,14	72,16	72,18	72,20	72,20
			Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	%	5,52	5,94	7,53	8,97	10,34	11,67	12,98	12,98
				Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	%	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59	39,59
				Persentase pengelolaan sampah	%	32,42	39,80	41,20	42,90	47,99	53,50	54,91	54,91
				Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	%	6	8	10	13	15	18	22	22



Tabel 3. 3.  
Rincian Program dan Kegiatan Perubahan 2020

PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN				
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	%	100	%	1.028.126.000	397.998.975	-630.127.025	-61,29%
Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	6000	surat	6000	surat	30.000.000	12.071.695	-17.928.305	-59,76%
		Jumlah arsip yang dikelola	Jumlah arsip yang dikelola	4	Jenis Arsip	4	Jenis Arsip				
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	19	rapat	22	rapat	200.000.000	101.851.000	-98.149.000	-49,07%
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	112	orang hari	17	orang hari				
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	301	orang hari	8	orang hari				
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	50	kali	2	kali				
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	Paket	0	Paket	200.000.000	0	-200.000.000	-100,00%
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1	Paket	0	Paket				
		Jumlah aset yang dikelola	Jumlah aset yang dikelola	1	Paket	0	Paket				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Luas gedung kantor yang dipelihara	21945	m2	21945	m2	200.000.000	137.926.000	-62.074.000	-31,04%



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Jumlah peralatan yang dipelihara	37	Unit	14	Unit	250.000.000	144.066.280	-105.933.720	-42,37%
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	9	Unit	0	Unit				
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	8	Unit	8	Unit				
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	11	Unit	11	Unit				
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	Paket	0	Paket	100.000.000	0	-100.000.000	-100,00%
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekwensi Pembinaan ASN	Frekwensi Pembinaan ASN	2	kali	0	kali	48.126.000	2.084.000	-46.042.000	-95,67%
		Jumlah ASN yang dibina	Jumlah ASN yang dibina	115	orang	0	orang				
		Jumlah JFT yangterfasilitasi penilaian angka kreditnya	Jumlah JFT yangterfasilitasi penilaian angka kreditnya	5	orang	0	orang				
Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	%	100	%	172.351.000	66.325.330	-106.025.670	-61,52%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	13	Dokumen	13	Dokumen	112.351.000	53.654.000	-58.697.000	-52,24%
		Jumlah Kegiatan Yang dikelola	Jumlah Kegiatan Yang dikelola	32	Kegiatan	32	Kegiatan				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	0	Dokumen	0	Dokumen	20.000.000	8.662.000	-11.338.000	-56,69%
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen				



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	4	Dokumen	4	Dokumen	20.000.000	3.514.000	-16.486.000	-82,43%
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun	Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun	12	Dokumen	12	Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	12	Dokumen	12	Dokumen				
		Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun	1	Dokumen	0	Dokumen				
Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	1	Dokumen	0	Dokumen	20.000.000	495.330	-19.504.670	-97,52%
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	1	Dokumen	0	Dokumen				
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun	Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen				
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen				
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	31	%	22	%	1.609.882.000	726.177.382	-883.704.618	-54,89%
		Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	67	%	53	%				
		Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	38	%	28	%				



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	24	%	18	%				
Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.	Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU	10	Usaha/Ke giatan	0	Usaha/K egiatan	230.000.000	29.802.500	-200.197.500	-87,04%
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	40	usaha/keg iatan	30	usaha/ke giatan				
		Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	100	orang	30	orang				
		Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	2	dokumen	1	dokumen				
		Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	10	lokasi	0	lokasi				
		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina	30	usaha/keg iatan	0	usaha/ke giatan				
Pengendalian Pencemaran Limbah B3	Pengendalian Pencemaran Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	50	usaha/keg iatan	40	usaha/ke giatan	150.000.000	18.597.500	-131.402.500	-87,60%
		Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan	Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan	5	Rekomend asi/ijin	1	Rekomen dasi/ijin				
		Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	1	dokumen	0	dokumen				
Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	2	dokumen	0	dokumen	200.000.000	26.805.000	-173.195.000	-86,60%
		Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau	4	usaha/keg iatan	4	usaha/ke giatan				
		Jumlah sungai yang diuji	Jumlah sungai yang diuji	15	Sungai	0	Sungai				
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	30	usaha/keg iatan	30	usaha/ke giatan				
		Jumlah rekomendasi/ijin IPLC yang dikeluarkan	Jumlah rekomendasi/ijin IPLC yang dikeluarkan	5	rekomend asi/ijin	1	rekomen dasi/ijin				
		Jumlah embung/waduk yang diuji	Jumlah embung/waduk yang diuji	1	Paket	0	Paket				
		Jumlah sarpras pemeliharaan sungai	Jumlah sarpras pemeliharaan sungai	1	paket	0	paket				
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	150	orang	100	orang	300.000.000	13.073.000	-286.927.000	-95,64%



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk	Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk	3	kelompok	0	kelompok				
		Jumlah titik lokasi bersih kali	Jumlah titik lokasi bersih kali	5	Sungai	0	Sungai				
		Jumlah sarpras PPA yang diadakan	Jumlah sarpras PPA yang diadakan	1	paket	0	paket				
		Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	0	dokumen	0	dokumen				
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	200	Sampel	100	Sampel	488.000.000	596.954.172	108.954.172	22,33%
		Jumlah Peralatan Laboratorium Yang dibeli	Jumlah Peralatan Laboratorium Yang dibeli	1	Paket	1	Paket				
		Jumlah Bahan Kimia / Reagen yang dibeli	Jumlah Bahan Kimia / Reagen yang dibeli	1	Paket	1	Paket				
		Jumlah Limbah yang dikelola	Jumlah Limbah yang dikelola	800	Kg	600	Kg				
		Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara	Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara	1	Paket	1	Paket				
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Pelatihan yang diikuti	Jumlah Pelatihan yang diikuti	3	Pelatihan	0	Pelatihan	241.882.000	40.945.210	-200.936.790	-83,07%
		Jumlah Sistem Yang Dikelola	Jumlah Sistem Yang Dikelola	1	Paket	1	Paket				
		Jumlah Parameter Yang Terakreditasi	Jumlah Parameter Yang Terakreditasi	11	Parameter	11	Paramete r				
Penyediaan Sarana dan Prasaran Pengendalian Pencemaran Air (DAK)	Penyediaan Sarana dan Prasaran Pengendalian Pencemaran Air (DAK)	Jumlah sarpras PPA yang diadakan	Jumlah sarpras PPA yang diadakan	0	paket	0	paket	0	0		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah B3 (DAK)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah B3 (DAK)	Jumlah sarpras PPU dan LB3 yang diadakan	Jumlah sarpras PPU dan LB3 yang diadakan	0	paket	0	paket	0	0		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK).	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK).	Jumlah Sarana Prasarana yang dibeli	Jumlah Sarana Prasarana yang dibeli	1	Paket	1	Paket	0	0		
Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	60	%	60	%	750.000.000	85.205.687	-664.794.313	-88,64%
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan	100	%	100	%				



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		lingkungan hidup daerah	lingkungan hidup daerah								
		Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	100	%	100	%				
		Persentase kelompok/individu yang mendapat penghargaan di bidang LH	Persentase kelompok/individu yang mendapat penghargaan di bidang LH	48	%	48	%				
Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi	1437	Usaha dan/atau Kegiatan	1437	Usaha dan/atau Kegiatan	200.000.000	58.003.777	-141.996.223	-71,00%
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi	6	Usaha dan/atau Kegiatan	2	Usaha dan/atau Kegiatan				
		Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	180	peserta	0	peserta				
		Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup	Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup	50	Peserta	50	Peserta				
		Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan	Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan	1	paket	0	paket				
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan non tambang yang diawasi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan non tambang yang diawasi	15	Usaha dan/atau Kegiatan	10	Usaha dan/atau Kegiatan				
		Jumlah kendaraan teknis pengawasan yang dibeli dan pemeliharaan	Jumlah kendaraan teknis pengawasan yang dibeli dan pemeliharaan	0	paket	0	paket				
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan DLH	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan DLH	1	paket	0	paket				
Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.	Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.	Jumlah dokumen IKLH	Jumlah dokumen IKLH	2	dokumen	0	dokumen	300.000.000	1.164.805	-298.835.195	-99,61%



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		Jumlah dokumen Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	1	paket	0	paket				
		Jumlah dokumen IKPLHD	Jumlah dokumen IKPLHD	1	dokumen	0	dokumen				
		Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup	Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup	1	Paket	0	Paket				
		Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1	paket	0	paket				
		Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup	Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup	20	peserta	0	peserta				
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	6	pengharga an	0	pengharg aan	150.000.000	685.105	-149.314.895	-99,54%
		Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup	Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup	2	rancangan	0	rancanga n				
		Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup	Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup	20	orang	0	orang				
		Jumlah kendaraan teknis yang dibeli dan pemeliharaan	Jumlah kendaraan teknis yang dibeli dan pemeliharaan	0	paket	0	paket				
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	30	orang	0	orang				
		Jumlah peserta sosialisasi adipura	Jumlah peserta sosialisasi adipura	120	orang	0	orang				
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura	Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura	6	kali	0	kali				



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat	Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat	21	peserta	0	peserta				
Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup.	Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup.	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	25	kasus	6	kasus	100.000.000	25.352.000	-74.648.000	-74,65%
		Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	16	laporan	0	laporan				
		Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan	Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan	15	surat	0	surat				
		Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan	Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan	75	orang	0	orang				
		Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan	Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan	5	titik	0	titik				
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persentase jumlah sampah yang tertangani	20	%	20	%	15.103.254.000	10.799.791.450	-4.303.462.550	-28,49%
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persentase cakupan area pelayanan sampah	10	%	10	%				
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	23	%	23	%				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	Jumlah lahan TPS3R yang dibeli	Jumlah lahan TPS3R yang dibeli	0	Paket	0	Paket	5.000.000.000	2.375.000.000	-2.625.000.000	-52,50%
		Jumlah TPSS yang direvitalisasi	Jumlah TPSS yang direvitalisasi	1	Paket	0	Paket				
		Alat pengolah sampah	Alat pengolah sampah	1	Paket	2	Paket				
		Pembangunan TPST	Pembangunan TPST	1	Paket	2	Paket				
		Alat GPS dan kelengkapannya untuk prasarana pendukung kendaraan persampahan	Alat GPS dan kelengkapannya untuk prasarana pendukung kendaraan persampahan	1	Paket	0	Paket				
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah.	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	Jumlah Alat yang dipelihara	97	Unit	97	Unit	8.929.854.000	7.899.069.000	-1.030.785.000	-11,54%



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		Jumlah kendaraan yang dikelola	Jumlah kendaraan yang dikelola	38	Unit	38	Unit				
		Jumlah Pengelola Penanganan Sampah yang dikelola	Jumlah Pengelola Penanganan Sampah yang dikelola	206	Orang	206	Orang				
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras	Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras	1	Paket	0	Paket				
		Instalasi listrik TPST	Instalasi listrik TPST	1	Paket	0	Paket				
		Jumlah Laporan Penanganan Sampah	Jumlah Laporan Penanganan Sampah	1	Dokumen	0	Dokumen				
Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	Jumlah Alat yang dipelihara	4	Unit	3	Unit	423.400.000	321.870.700	-101.529.300	-23,98%
		Jumlah kendaraan yang dikelola	Jumlah kendaraan yang dikelola	4	Unit	4	Unit				
		Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola	Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola	35	Orang	10	Orang				
		Jumlah Bahan Pengolah Sampah yang dibeli	Jumlah Bahan Pengolah Sampah yang dibeli	1	Paket	1	Paket				
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.	Jumlah sosialisasi	Jumlah sosialisasi	21	Kali	8	Kali	750.000.000	203.851.750	-546.148.250	-72,82%
		Pembentukan Bank Sampah Kantor dan Sekolah	Pembentukan Bank Sampah Kantor dan Sekolah	10	Unit	1	Unit				
		Jumlah Laporan Pengurangan Sampah	Jumlah Laporan Pengurangan Sampah	1	Dokumen	0	Dokumen				
		Jumlah publikasi pengurangan sampah yang dibuat	Jumlah publikasi pengurangan sampah yang dibuat	1	Paket	0	Paket				
		Jumlah Bank sampah Yang dibina	Jumlah Bank sampah Yang dibina	100	Unit	10	Unit				
		Jumlah Lomba Bank Sampah yang dilaksanakan	Jumlah Lomba Bank Sampah yang dilaksanakan	1	Paket	1	Paket				
		Jumlah bantuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah	Jumlah bantuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah	1	Paket	0	Paket				



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		Fasilitasi Gerakan Pungut Sampah	Fasilitasi Gerakan Pungut Sampah	6	Kali	1	Kali				
Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah (DAK)	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pengurangan sampah yang dibeli	Jumlah sarana dan prasarana pengurangan sampah yang dibeli	0	Paket	0	Paket	0	0		
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	4	%	4	%	4.646.542.000	2.277.307.000	-2.369.235.000	-50,99%
		Persentase RTH Publik yang terkelola	Persentase RTH Publik yang terkelola	25	%	25	%				
		Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan	Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan	38	%	38	%				
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	Jumlah kendaraan yang dikelola	Jumlah kendaraan yang dikelola	9	Unit	9	Unit	3.996.982.000	2.277.307.000	-1.719.675.000	-43,02%
		Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli	Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli	1	Paket	1	Paket				
		Penyusunan DED	Penyusunan DED	1	paket	0	paket				
		identifikasi sempadan (kepemilikan,kewenangan)	identifikasi sempadan (kepemilikan,kewenangan)	1	paket	1	paket				
		Pembebasan lahan	Pembebasan lahan	0	paket	0	paket				
		Pembangunan RTH	Pembangunan RTH	2	paket	2	paket				
		Jumlah alat yang dikelola	Jumlah alat yang dikelola	53	unit	53	unit				
		Jumlah kendaraan yang dibeli	Jumlah kendaraan yang dibeli	2	unit	0	unit				
		Jumlah alat yang dibeli	Jumlah alat yang dibeli	0	Unit	0	Unit				
		Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola	Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola	53	Orang	53	Orang				
		Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH	Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH	1	Paket	1	Paket				
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pengelolaan RTH	Jumlah Bangunan Konstruksi Pengelolaan RTH	0	Paket	0	Paket				
		Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli	Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli	1	Paket	1	Paket				



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		Jumlah mechanical electrical yang dikelola	Jumlah mechanical electrical yang dikelola	2169	Unit/mete r	2169	Unit/met er				
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	Jumlah bantuan hibah yang diterima masyarakat	Jumlah bantuan hibah yang diterima masyarakat	1	paket	0	paket	649.560.000	0	-649.560.000	-100,00%
		Pendataan dan identifikasi sekolah	Pendataan dan identifikasi sekolah	1	paket	0	paket				
		Penyusunan DED RTH sekolah sekolah	Penyusunan DED RTH sekolah sekolah	1	paket	0	paket				
		Pembangunan RTH sekolah	Pembangunan RTH sekolah	1	paket	0	paket				
		Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesan	Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesan	1	paket	0	paket				
		Sosialisasi RTH	Sosialisasi RTH	1	paket	0	paket				
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase luasan daerah resapan air dan rawan longsor yang dikonservasi	Persentase luasan daerah resapan air dan rawan longsor yang dikonservasi	1	%	1	%	2.566.533.000	747.251.930	-1.819.281.070	-70,88%
		Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	0,59	%	0,59	%				
		Persentase mata air yang dikonservasi	Persentase mata air yang dikonservasi	5	%	5	%				
		Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	4,57	%	4,57	%				
		Persentase sekolah Adiwiyata	Persentase sekolah Adiwiyata	15,88	%	15,88	%				
Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Sekolah Adiwiyata yang dibina	Sekolah Adiwiyata yang dibina	50	Sekolah	100	Sekolah	500.000.000	79.314.005	-420.685.995	-84,14%
		Jumlah peserta Bimtek Proklam	Jumlah peserta Bimtek Proklam	200	org	50	org				
		Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan	Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan	1	kali	0	kali				
		Jumlah fasilitasi sapras sekolah Negeri Adiwiyata	Jumlah fasilitasi sapras sekolah Negeri Adiwiyata	50	sekolah	0	sekolah				
		Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata	Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata	1	paket	1	paket				
		Jumlah Peserta Sosialisasi Sekolah adiwiyata	Jumlah Peserta Sosialisasi Sekolah adiwiyata	300	org	0	org				



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		Jumlah Peserta Bimtek Sekolah Adiwiyata	Jumlah Peserta Bimtek Sekolah Adiwiyata	200	oang	200	oang				
		Jumlah Penerima Penghargaan Kalapataru	Jumlah Penerima Penghargaan Kalapataru	1	org/Kelompok	0	org/Kelompok				
		Jumlah Pramuka Saka Kalpataru yang dibina	Jumlah Pramuka Saka Kalpataru yang dibina	1	Kelompok	0	Kelompok				
		Jumlah Desa Proklam yang dibina	Jumlah Desa Proklam yang dibina	35	Desa	35	Desa				
		Jumlah Fasilitas Sarpras Desa Proklam	Jumlah Fasilitas Sarpras Desa Proklam	1	Paket	0	Paket				
Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.	Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.	Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman	Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman	500	orang	500	orang	750.000.000	93.789.395	-656.210.605	-87,49%
		Jumlah Peserta sosialisasi	Jumlah Peserta sosialisasi	600	orang	0	orang				
		Penghijauan untuk Konservasi rawan bencana	Penghijauan untuk Konservasi rawan bencana	50	Ha	0	Ha				
		Jumlah Peserta Bimtek	Jumlah Peserta Bimtek	200	orang	90	orang				
		Penyusunan Dokumen Status Kerusakan	Penyusunan Dokumen Status Kerusakan	500	paket	0	paket				
		RAD Konservasi dan Review dokumen Kajian Status Kerusakan Lahan	RAD Konservasi dan Review dokumen Kajian Status Kerusakan Lahan	1	Dokumen	0	Dokumen				
Konservasi Kawasan Resapan Air..	Konservasi Kawasan Resapan Air..	Jumlah alat biopori yang dibeli	Jumlah alat biopori yang dibeli	1	paket	1	paket	750.000.000	260.522.500	-489.477.500	-65,26%
		Jumlah pohon yang ditanam dari bank pohon	Jumlah pohon yang ditanam dari bank pohon	1000	Pohon	1000	Pohon				
		Tersedianya sistem informasi sumber mata air	Tersedianya sistem informasi sumber mata air	1	paket	0	paket				
		Jumlah sumur resapan yang dibuat	Jumlah sumur resapan yang dibuat	2	paket	2	paket				
		Jumlah dokumen kajian yang dibuat	Jumlah dokumen kajian yang dibuat	1	dokumen	1	dokumen				
		luas lahan yang dikonservasi	luas lahan yang dikonservasi	60	ha	20	ha				
		Jumlah orang yang disosialisasi	Jumlah orang yang disosialisasi	200	orang	0	orang				
		Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	10	kelompok	10	kelompok				



PROGRAM KEGIATAN		SASARAN		TARGET				PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	VOL UME	SATUAN	VOL UME	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
		Paket tanah yang diabeli di sekitar mata air	Paket tanah yang diabeli di sekitar mata air	0	paket	0	paket				
		Pembuatan senderan pengaman mata air	Pembuatan senderan pengaman mata air	1	paket	0	paket				
		Jumlah pohon aren yang diselamatkan	Jumlah pohon aren yang diselamatkan	1	Paket	0	Paket				
Konervasi Keanekaragaman Hayati.	Konervasi Keanekaragaman Hayati.	jumlah dokumen yang dibuat	jumlah dokumen yang dibuat	2	dokumen	0	dokumen	150.000.000	54.450.000	-95.550.000	-63,70%
		Jumlah tanaman langka yang ditanam	Jumlah tanaman langka yang ditanam	1	Paket	1	Paket				
Koservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana (DBHCHT)	Koservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana (DBHCHT)	Penghijauan untuk Konservasi rawan bencana	Penghijauan untuk Konservasi rawan bencana	30	Ha	30	Ha	416.533.000	259.176.030	-157.356.970	-37,78%
Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim (DBHCHT)	Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim (DBHCHT)	jumlah fasilitas sapras sekolah Negeri Adiwiyata	jumlah fasilitas sapras sekolah Negeri Adiwiyata	0	paket	0	paket	0	0		
		Jumlah fasilitas sapras sekolah swasta Adiwiyata	Jumlah fasilitas sapras sekolah swasta Adiwiyata	0	paket	0	paket				
		Jumlah fasilitas sapras Desa proklam	Jumlah fasilitas sapras Desa proklam	0	paket	0	paket				
JUMLAH	JUMLAH							25.876.688.000	15.100.057.754	-10.776.630.246	-41,65%



## BAB IV P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Plafon Anggaran Sementara. Perubahan rencana kerja juga sebagai acuan dalam perubahan perjanjian kinerja. Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas. Perubahan Rencana Kerja mengacu pada RPJMD dan Renstra 2019 – 2024.

Rencana Kerja ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang. Oleh sebab itu pelaksanaan perubahan rencana kerja membutuhkan kecermatan, kreatifitas dan respon terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki sifat yang dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemerintah daerah.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2020 ini menjadi acuan kerjasama bagi unit-unit pelaksanaan di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu diharapkan unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup diharap membawa kemajuan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang, sehingga tercipta Kabupaten Magelang yang makin Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah sesuai dengan visi Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 4 Agustus 2020

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAGELANG



**IMAM BASORI, S.Sos., M.Si**

Kabina Utama Muda

NP. 19701115 199003 1 003